

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ANISYA YUSRIYA YULIANI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
Anisvamn101@gmail.com

ABSTRACT

This research was carried out the people in Kuantan Tengah Kuantan Singingi regency Riau Province. As for the purpose of this writing it consists of the objectives to know the factors that influence community participation. The population in this study is the head of the family who became a taxpayer in the district of Kuantan Tengah. Considering the number of population is too much, then the sampling technique is used on a regular basis Simple Random Sampling, namely a sampling technique used to determine the sample area when the object to be examined is very broad, because of the village in district Kuantan Tengah stratum is stratified or not the same. Then the sampling using Purposive Sampling, namely a technique used when the population has elements or members that are not homogeneous and stratified proportionality. In the data retrieval, using the primary and secondary data conducted by observation, interview, and questionnaires to respondents, then the data are analyzed descriptively qualitative theb compiled and associated with the theory related to the problem of public participation in paying the tax on the earth and building the taken conclusion. Property tax is the surface of the earth and the body of the erath underneath the surface of the earth includes land and waters (including swamps and waters)and sea area Republic in Indonesia. While building is plant contruction techques or permanently attached to the ground and waters. The population in this study is community in Kuantan Tengah sub-district with the respondents amount to 50.178 and 3 apparatus in office Badan Pendapatan Daerah in Kuantan Singingi Regency.

Keywords: *Partisipation, Property Tax*

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan kepada masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Peovinsi Riau. Adapun tujuan penulisan ini terdiri dari tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Populasi dalam dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) yang menjadi Wajib Pajak yang ada diwilayah Kecamatan Kuantan Tengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk masyarakat yaitu Simple Random Sampling teknik pengambilan sampel dengan sampling acak sederhana dilakukan dengan cara memilih atau mengambil sampel secara acak (random) dari populasi yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk pejabat yaitu Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Dalam pengambilan data, menggunakan data primer dan sekunder yang dilakukan secara observasi, wawancara. Pajak Bumi dan Bangunan adalah, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kuantan Tengah dengan jumlah responden 50.187 dan peneliti mengambil sampel sebanyak 100 orang masyarakat dan 3 orang aparatur di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci: *Partisipasi, PBB*

1. PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek untuk penelitiannya adalah masyarakat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Sudah merupakan suatu kenyataan bahwa dalam pembangunan nasional pemerintah melakukan pembangunan disegala aspek kehidupan, baik itu aspek politik, sosial budaya, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Aspek ini bertujuan untuk membina usaha yang terus menerus yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan baik dinegara maju, Negara sedang berkembang, maupun Negara terbelakang sekalipun. Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang yang juga menyelenggarakan pembangunan nasional secara bertahap dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Inu Kencana Syafie dan Welasari (2014:53) yang dimaksud dengan pembangunan disini ialah sebagaimana yang dikemukakan dalam bukunya “ilmu administrasi” yaitu “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut seperti berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tentu saja membutuhkan dana atau pembiayaan yang sangat besar jumlahnya. Jika dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), pemasukan dana yang diterima oleh Negara diperoleh dari dua sumber yaitu penerimaan dari dalam negeri dan bantuan luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri diperoleh dari sektor minyak dan gas (migas) dan dari sektor non migas (pajak dan non pajak). Sedangkan bentuk bantuan dari luar negeri adalah bantuan program dan bantuan proyek.

Sistem perpajakan yang terbaik dari sudut pandangan ilmu ekonomi adalah sistem perpajakan yang memiliki pengaruh-pengaruh ekonomi yang paling baik atau setidaknya tidaknya memberikan pengaruh yang paling minimum.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi Negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan pendidikan, perekonomian dan stabilitas politik sedangkan penerimaan disektor migas sesuai dengan hukum alam jika dieksploitasi secara terus menerus cenderung akan berkurang dan nantinya akan habis. Bagaimanapun, pajak dipungut tanpa terlalu membebani rakyat dan adil dalam pelaksanaannya. Masalah perpajakan termaktub dalam pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya: “pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang”. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah primadona penerimaan Negara yang paling potensial. Penerimaan Negara dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan Negara dari sektor pajak merupakan “motor penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan nasional akan berhasil apabila kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat disuatu Negara. Jadi dalam pelaksanaannya pemerintah berusaha melibatkan seluruh rakyat dalam pembangunan tersebut.

Didalam menjalankan peran dibidang ekonomi pemerintah lebih harus menekankan adanya pengawasan yang arah kegiatan ekonomi bukan kepada penguasa yang sebanyak mungkin untuk kegiatan tersebut. Pemerintah Indonesia tidak menghendaki terjadinya monopoli pasar, tetapi menghendaki terjadinya asas demokrasi yang sesuai dengan UUD 1945. Dan diharapkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang mengarah pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus Pajak Bumi dan Pembangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kenyataan bahwa kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia yang sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung yang memiliki peranan bagi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga logis sekali jika mereka yang memperoleh manfaat kekayaan alam itu menyerahkan sebagian kenikmatan atau keuntungan yang diperoleh kepada Negara melalui pembayaran pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada awalnya termasuk kedalam pajak negara kemudian dialihkan wewenangnya kepada pemerintah daerah yang termasuk pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian dapat dipahami, pendapatan negara maupun daerah tidak hanya berasal dari pihak pemerintah melalui sumber kekayaan alami, hasil perusahaan negara atau daerah atau pinjaman dan lainnya tetapi juga berasal dari partisipasi masyarakat berupa pajak-pajak yang harus dibayar sesuai peraturan yang berlaku.

Keberhasilan pemerintah nantinya dalam hal peningkatan penerimaan pajak ini berarti kita dapat membiayai segala kegiatan yang berhubungan dengan pemabangunan, tanpa tergantung dari bantuan luar negeri lagi. Patut kita ketahui tingkat ketergantungan dengan luar negeri sangat besar. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya hutang luar negeri.

Supaya penerimaan pajak itu dapat berhasil dan dapat dijadikan sumber pemasukan negara serta setiap wajib pajak mau membayar, maka setiap orang harus mengerti tentang arti dan fungsi pajak itu sebenarnya. Tanpa adanya pengertian dari masyarakat mustahil akan terjadi peningkatan pendapatan negara. Penelitian ini dilakukan agar terciptanya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut Dr.Made Pidarta (Siti Irene Astuti Dwiningrum 2011:50), partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi menurut

Hunryar dan Hecman (dalam Siti Irne Astuti Dwiningrum 2011:50) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka.

Sedangkan (dalam Seligman dan Edwin dalam Muhammad Al Amin 2003:9) menyatakan bahwa “ pengertian partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar”. Dari rumusan diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi itu selalu dominan bahkan tidak dapat dipisahkan dalam segala kehidupan masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Partisipasi masyarakat, berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat dapat diharapkan dapat ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.(dalam Pasaribu dan Simanjutak 1986:345).

2.2. Pajak Bumi Dan Bangunan

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo 2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum).

Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara,yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang,pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *budgetair*
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis peneltian ini adalah penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dapat diartikan sebgai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Filsafat positivisme memandang realitas atau gejala atau fenomena itu dapat diklarifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Kemudian tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolerasi yaitu, penelitian yang dilakukan untuk membandingkan antara persamaan dengan perbedaan atau fakta berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah ada sehingga hasilnya dapat terlihat jelas

dan tingkat eksplanasi atau penjelasannya dalam bentuk survei yang informasinya dikumpulkan dari beberapa sampel yang langsung menggunakan kusioner dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yaitu dari teknik observasi, kuesioner, wawancara, serta dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1:Rekapitulasi Indikator Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

NO	Indikator	Rata-Rata (%)	Kategori
1	Pengambilan Keputusan	37,5%	Kurang Terlaksana
2	Pelaksanaan	48,13%	Cukup Terlaksana
3	Pengambilan Manfaat	62%	Terlaksana
4	Evaluasi	50,27%	Cukup Terlaksana
Rata-rata		49,47%	

Sumber : Olahan Data Kuesioner, Tahun 2019

Pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa cukup terlaksana, hal ini dapat dilihat dari rata-rata jawaban responden 49,47% jika dilihat dari kategori penilaian berada pada peringkat ke tiga (41%-60%) yang berarti cukup terlaksana.

1. Pengambilan keputusan yang dijadikan indikator penilaian terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Dari hasil wawancara responden mengatakan bahwa "*Masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ini sebab masyarakat berfikir bahwa tidak perlu ikut,karena kita hanya mengikuti alur pemerintah saja.*"

(Bapak Kabid Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan, Bapak Kabid Pendaftaran, Penilaian, dan Penetapan serta Ibu Kabid Penerimaan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 16 April 2019).

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat dilihat bahwa masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ini, itu disebabkan masyarakat berfikir tidak perlu untuk mengikuti partisipasi ini, karena akan mengikuti alur pemerintahan saja, padahal jika dipahami lagi pembangunan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus mendapatkan suara dari masyarakat, karena program yang direncanakan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus menguntungkan dan baik oleh masyarakatnya, oleh sebab itu masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ini, karena masyarakat dituntut untuk mengarahkan arah dan orientasi pembangunan di daerahnya.

2. Dalam pelaksanaan ini untuk mengetahui apakah masyarakat sudah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak salah satunya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari hasil wawancara adapun jawaban yang diberikan responden adalah "*Dalam kewajibannya sebagai wajib pajak masyarakat masih kurang sadar atas kewajibannya sebagai wajib pajak, itu dikarenakan masyarakat belum mengerti arti pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan*".

(Bapak Kabid Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan, Bapak Kabid Pendaftaran, Penilaian, dan Penetapan serta Ibu Kabid Penerimaan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 16 April 2019).

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak masih kurang terlaksana itu disebabkan karena masyarakat masih belum mengerti tentang arti pentingnya dalam pembayaran PBB , karena jika dilihat dari fungsinya pajak memiliki fungsi yang terbagi atas dua item, yang pertama fungsi budgetair (pajak

sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya) yang kedua fungsi mengatur (pajak sebagai alat untuk mengtur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi) jika masyarakat paham akan fungsi pajak maka pembayaran PBB yang baik akan terlaksana dan sesuai target.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi bahwa Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat kurang terlaksana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang menjadi motifator untuk bisa menjadi orang besar, pintar seperti beliau dan telah memberikan arahan dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan ini dengan baik.
3. Bapak Desriadi, S.sos.,M.Si selaku ketua program studi ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Desriadi, S.sos.,M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi, dan sterusnya Bapak Sahri Muharam , S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang dalam hal ini dapat tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
6. Seluruh staf, karyawan tata usaha fakultas ilmu sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membantu penulis yang berhubungan dengan penyelesaian penulisan ini.
7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ayahanda M.Abduh yang penulis banggakan dan Ibunda tersayang Nurlaili, kepada keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun secara materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dengan baik.
8. Abang dan kakak tersayang Harwan Seno dan Devi Novita yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat. Nasehat dan saran ia berikan adalah hal yang menolong dan membuat saya tersadar untuk selalu berusaha lebih baik dalam mengerjakan penulisan ini.
9. Teman seperjuangan Meriana Nurlianti, Adella Claudia Rivani, Rira Permatasari terimakasih atas selalu membantu dan memberi dukungan.
10. Sahabat Jauh Tiwi Herfiana Putri, Lilis Wahyuni, Widia Nengsih, Sonia Oktavia, Maulia Wellan Dari, Wira Melyca Sadri terimakasih atas dukungan dan do'anya dari jauh.
11. Adi Kurniawan terimakasih sudah menjadi partner terbaik mulai dari pembuatan proposal hingga pembuatan skripsi sampai selesainya pembuatan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fahmi, Irham. 2016. “ *Prilaku Organisasi*”. Bandung: Alfabeta

Feriyanto & Endang. 2015. “*Pengantar Manajemen*”. Tamanwinangun: Mediatra

- Hasibuan Malayu S.P. 2011. *“Organisasi dan Motivasi”*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Inu Kencana S. & Welasari. 2015. *“Ilmu Administrasi”*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR
- Riwu Kaho. 2017. *“Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia”*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kumorotomo Wahyudi. 2014. *“Etika Administrasi Negara”*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2011, *“Perpajakan”*. Yogyakarta : CV. Andi
- Rusjdi. 2007. *“KUP dan Tata Cara Perpajakan”*. Jakarta: PT.MACANA JAYA CEMERLANG
- Riant. 2012. *“Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Implementasi”*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo kelompok gramedia
- Rivai Veitsal dan Ella Djauhari Sagala. 2013. *“Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan:”*. Jakarta: Raja Wali Pers
- Rusjdi. 2008. *“PBB, PBHTB & Bea Materai”*. Jakarta: PT.MACANA JAYA CEMERLANG
- Salam Drama Setiawan. 2007. *“Manajemen Pemerintahan Indonesia”*. Jakarta: Djambatan
- Siti Irene. 2015. *“Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sondang, Siagian. 2012. *“Teori Pengembangan Organisasi”*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. *“Metode Penelitian Administrasi”*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *“Metode Penelitian & Pengembangan”*. Bandung: Alfabeta
- Trijono Rachmat. 2015. *“Metode Penelitian Kuantitatif”*. Jakarta: PAPAS SINAR SINANTI
- Thoha Mifta. 2008. *“Ilmu Administrasi Kontemporer”*. Jakarta: Kencana
- Yanto. 2016. *“Statistika Inferensi untuk Penelitian dengan Minitab”*. Yogyakarta: C.V Andi
- Widiyanti, Ninik. 1992. *“Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Undang-undang:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Bumi dan Bangunan